

GENDER DAN KOMUNIKASI POLITIK: PEREMPUAN SEBAGAI KOMUNIKATOR DI BALI

¹Ni Kadek Novianti, ²Nuning Indah Pratiwi

¹² Universitas Pendidikan Nasional, Bali

noviantiikadek@gmail.com

Abstract

This study explores the role of Balinese women as political communicators, focusing on the challenges of patriarchal culture and opportunities that can be optimized through culturally-based communication strategies. Although Balinese women possess significant potential in conveying political messages, their involvement is often limited by traditional norms and gender stereotypes. This study employs a qualitative method with semi-structured interviews to collect data from academics and community leaders. Aristotle's rhetorical theory (ethos, pathos, logos) is used as the analytical framework. The findings reveal that women can build credibility through participation in cultural activities, foster emotional connections with audiences, and construct logical arguments. However, limited access to political education and leadership training remains a major barrier. It concludes that Balinese women can serve as effective political communicators if supported through inclusive political education and culturally-based communication training programs.

Keywords: Political communicators, gender challenges, communication strategies, retorika Aristoteles, local culture

Abstrak

Penelitian ini membahas peran perempuan Bali sebagai komunikator politik, dengan fokus pada tantangan budaya patriarki dan peluang yang dapat dioptimalkan melalui strategi komunikasi berbasis budaya. Meskipun perempuan Bali memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan politik, keterlibatan mereka sering kali dibatasi oleh norma adat dan stereotipe gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data dari akademisi dan tokoh masyarakat. Teori retorika Aristoteles (*ethos, pathos, logos*) digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dapat membangun kredibilitas melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menciptakan hubungan emosional dengan audiens, dan menyusun argumen logis yang relevan. Namun, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan masih menjadi hambatan signifikan. Kesimpulannya, perempuan Bali dapat berperan sebagai komunikator politik yang efektif jika diberikan dukungan yang lebih inklusif melalui pendidikan politik berbasis budaya dan program pelatihan komunikasi..

Kata kunci: Komunikator politik, tantangan gender, strategi komunikasi, retorika Aristoteles, budaya lokal

Pendahuluan

Peran perempuan dalam politik Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, mencakup keterwakilan mereka sebagai pemimpin dan komunikator politik (Zamroni, 2016).

Namun, tantangan seperti stereotipe gender dan hambatan budaya masih mengakar kuat, terutama di Bali. Bali, sebagai salah satu pulau di Indonesia, tidak hanya memiliki desa resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, tetapi juga dikenal dengan desa adat yang memiliki struktur sosial dan budaya khas (Joniarta et al., 2019). Desa adat ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam membentuk norma dan nilai yang memengaruhi peran perempuan di ruang publik dan politik. Dalam banyak kasus, perempuan kerap diposisikan sebagai pilihan kedua atau sekadar pelengkap dalam pengambilan keputusan politik, yang menunjukkan adanya bias struktural yang menempatkan laki-laki sebagai prioritas utama. Kaderisasi perempuan dalam partai politik juga terbilang masih lemah, terlihat dari upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang lebih sering bersifat administratif tanpa substansi pemberdayaan yang berkelanjutan (Liu et al., 2019). Perempuan sering kali direkrut tanpa seleksi yang matang, hanya sekadar memenuhi persyaratan formal, bukan sebagai aktor strategis yang mampu membawa perubahan.

Gender dipahami bukan hanya sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang menetapkan norma dan peran tertentu bagi setiap jenis kelamin. Norma-norma ini sering membatasi perempuan pada peran domestik, sementara laki-laki diasosiasikan dengan peran publik. Ketimpangan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan pengambilan keputusan, sehingga membentuk dinamika sosial yang membatasi peluang perempuan (Kath Woodward, 2008). Di Bali, budaya patrilineal yang kuat semakin memperbesar tantangan yang dihadapi perempuan. Norma adat seringkali membatasi perempuan pada peran tradisional sebagai pelaksana upacara keagamaan, rumah tangga, dan pendukung harmoni keluarga, sementara ruang partisipasi dalam politik formal relatif kecil. Stigma bahwa politik adalah dunia yang keras dan tidak sesuai dengan kodrat perempuan turut memperburuk keadaan ini (Subandi, 2023). Akibatnya, keterlibatan perempuan Bali dalam politik formal menjadi sangat minim, meskipun sejarah menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai komunikator yang efektif dan pemimpin yang kompeten di berbagai lapisan masyarakat.

Komunikasi politik memegang peran sentral dalam membangun kepercayaan publik dan menyampaikan visi kepemimpinan. Perempuan, meskipun sering dihadapkan pada stereotipe kurang agresif atau tegas dibandingkan laki-laki, justru memiliki gaya komunikasi empatik, inklusif, dan kolaboratif, yang efektif dalam membangun hubungan lintas kelompok (Yuwono, 2018). Di Bali, pemimpin perempuan yang menguasai keterampilan komunikasi politik dapat berperan sebagai mediator dalam konflik sosial sekaligus memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan. Namun, keterbatasan akses perempuan Bali terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan masih menjadi hambatan yang signifikan, sehingga kebijakan afirmasi perlu diperluas untuk mencakup pelatihan khusus bagi perempuan, terutama di tingkat lokal agar mereka dapat bersaing secara setara di ajang politik.

Penelitian ini menggunakan teori retorika Aristoteles, yang mencakup tiga elemen persuasi utama: *ethos* (kredibilitas pembicara), *pathos* (daya tarik emosional), dan *logos* (penalaran logis). *Ethos* membantu perempuan membangun kepercayaan publik melalui integritas dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. *Pathos* memungkinkan mereka menjalin hubungan empatik dengan audiens, sedangkan digunakan untuk menyusun argumen yang logis dan meyakinkan (Roberts, 2004). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana perempuan Bali, sebagai komunikator politik yang mampu memanfaatkan kekuatan persuasi mereka untuk menghadapi tantangan budaya dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran perempuan sebagai komunikator politik di Bali, dengan menyoroti tantangan budaya dan sosial yang mereka hadapi serta strategi komunikasi yang mereka gunakan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis bagaimana budaya lokal Bali mempengaruhi komunikasi politik perempuan dan memberikan wawasan praktis bagi perempuan untuk berkontribusi lebih signifikan dalam dunia politik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

literatur terkait gender dan komunikasi politik, sekaligus menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam ranah politik, khususnya di Bali.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan melalui sesi tanya-jawab antara penulis dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Dalam pendekatan ini, peneliti membawa pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan jawaban yang terbuka dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Wawancara semi-struktur dipilih karena sifatnya yang fleksibel namun tetap fokus pada permasalahan inti, sehingga memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang lebih mendalam. Pendekatan ini membantu penulis menggali opini dan pengalaman narasumber secara lebih komprehensif, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dari observasi dan wawancara kepada para informan, maka didapatkan bahwa tantangan perempuan di Bali terutama dalam politik sebagai komunikator politik masih terus menjadi polemik yang menarik diperbincangkan, berikut pernyataan para informan.

Ni Putu Yunita Anggreswari selaku akademisi menjelaskan bahwa budaya patriarki di Bali menjadi salah satu hambatan utama perempuan untuk berkiprah di ranah publik, khususnya politik. Menurutnya, struktur budaya dan sosial di Bali masih menempatkan perempuan dalam peran yang terbatas:

“Budaya patriarki di Bali diatur pula dalam hukum waris yang mengatakan bahwa warisan adalah milik keturunan laki-laki, sehingga perempuan kehilangan haknya di rumah asalnya. Patriarki juga membentengi perempuan dengan triple roles (Peran lipat tiga yang dilakukan oleh perempuan meliputi kerja reproduksi, kerja produktif dan kerja komunitas) yaitu sebagai ibu, istri, dan menantu di rumah (domestic roles), pelaksana adat (social roles), dan pencari nafkah (productive roles). Kompleksnya peran ini membuat domestikasi pada perempuan sehingga mereka memiliki batasan dalam mencapai karir pada ranah publik” (Wawancara 12 Desember 2024).

Pandangan ini diperkuat oleh I Nyoman Subanda selaku pengamat politik dan akademisi, yang mengidentifikasi tiga jenis hambatan perempuan dalam politik: institusional, struktural, dan kultural. Beliau menjelaskan:

“Hambatan institusional terlihat dari beberapa regulasi yang membatasi perempuan, seperti larangan menikah untuk perempuan berpangkat tinggi di institusi tentara/polisi. Hambatan struktural adalah cara berpikir masyarakat yang menganggap perempuan sebagai subordinat. Hambatan budaya muncul dari norma yang menganggap perempuan sebaiknya berada di ranah domestik, bukan publik” (Wawancara 12 Desember 2024).

Namun, kedua akademisi ini juga menekankan pentingnya pendekatan baru dalam komunikasi politik perempuan. Ni Putu Yunita Anggreswari menyoroti bahwa aktivitas adat seperti arisan PKK dan “menyama braya” atau (kegiatan gotong-royong di Bali)” dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau audiens. I Nyoman Subanda menambahkan pentingnya gaya komunikasi yang lebih humanis:

“Perempuan harus menunjukkan kecerdasan melalui cara yang soft dan sopan, sehingga orang kagum dan menjadi simpatik. Ini dapat membantu mengubah citra

politik menjadi lebih manusiawi” (Wawancara 12 Desember 2024).

Komunikasi Politik Perempuan di Bali Tantangan Gender dan Budaya Patriarki

Pernyataan terkait tantangan perempuan sebagai komunikator politik di Bali mengingat masih kuatnya budaya patriarki disampaikan oleh Ni Made Sri Yogi Lestari selaku Ketua DPW Partai Amanat Nasional Bali, yang menegaskan bahwa perempuan harus keluar dari stigma patriarki yang membatasi peran mereka. Beliau berpendapat:

“Perempuan tidak harus merasa eksklusif, kita entitas yang sama seperti laki-laki. Jangan selalu merasa playing victim. Banyak kok figur-firug perempuan yang mulai bersuara dan menunjukkan dirinya harus berbicara drama.” (Wawancara 8 Desember 2024)

Pernyataan juga disampaikan oleh informan bernama Grace Anastasia Surya Widjaja selaku DPRD Kota Denpasar bahwasannya utama perempuan dalam politik adalah menghadapi stigma bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Hal ini membuat perempuan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat:

“Ketidakramahan politik terhadap politisi perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam menyuarakan identitas mereka. Namun, sensitivitas perempuan sering menjadi kekuatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas” (Wawancara 8 Desember 2024).

Pernyataan ini didukung dan diperkuat oleh Putu Melati Purbaninggratyo selaku selaku DPRD Kota Denpasar, yang menyebut bahwa budaya patriarki sering membuat perempuan merasa tidak percaya diri untuk masuk ke dunia politik:

“Budaya dan kebiasaan membuat perempuan merasa belum selesai dengan urusan rumah. Mereka merasa berdosa kalau harus terjun ke dunia politik, padahal ruangnya sudah ada.” (Wawancara 3 Desember 2024)

Strategi Perempuan dalam Komunikasi Politik

Perempuan sebagai komunikator politik tentunya harus mempunyai kredibilitas atau kemampuan dalam menyalurkan pesan komunikasi politik tidak hanya kepada konstituennya, tetapi juga kepada masyarakat. Sebagai komunikator politik, perempuan Bali dapat memanfaatkan aktivitas adat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan konstituennya, tetapi mampu menganalisis komunikannya dengan pesan komunikasi yang efektif agar *feedback* diterima secara positif. Informan Ni Made Sri Yogi Lestari menyoroti bahwa perempuan yang memahami kelebihan dirinya akan mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri:

“Kalau perempuan sadar apa yang dia deliver itu sesuatu yang beda dan orang lain ga punya, dia akan tetap stay straight, tanpa harus merasa kalah oleh sistem.” (Wawancara 8 Desember 2024)

Hal ini ditambahkan oleh informan Grace Anastasia Surya Widjaja, sensitivitas perempuan menjadi keunggulan utama dalam membangun komunikasi politik:

“Kelebihan kaum perempuan adalah memiliki sensitivitas lebih dari kaum laki-laki. Kepakaan ini akan membentuk pola komunikasi yang lebih terstruktur antara komunikator dengan komunitas, sehingga tujuan komunikasi politik bisa lebih efektif.” (Wawancara 8 Desember 2024)

Informan Putu Melati Purbaninggratyo juga menambahkan bahwa aktivitas adat seperti *mebraye* dan *posyandu* dapat menjadi alat komunikasi politik yang efektif:

“Tanpa disadari, ibu-ibu di banjar sudah berpolitik. Mereka yang mebraye, mengurus banten, atau posyandu itu sudah bagian dari organisasi. Hanya saja, mereka belum

menyadari bahwa itu juga politik” (Wawancara 3 Desember 2024).

Selain itu, media sosial juga menjadi alat penting dalam menjangkau masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ni Putu Yunita Anggreswari:

“Melalui media sosial seperti Instagram, politisi perempuan Bali menyuarakan permasalahan yang terjadi di Bali, solusi yang akan dilakukan, serta mengunggah kebijakan pemerintah untuk memancing diskusi dengan masyarakat” (Wawancara 12 Desember 2024)

Gaya Komunikasi yang Humanis dan Efektif

Perempuan memiliki kelebihan berupa kemampuan untuk menyampaikan pesan yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini dapat dicermati dengan gaya komunikasi perempuan yang lebih humanis dan efektif dalam menyalurkan pesan komunikasi politiknya. Menurut informan Ni Made Sri Yogi Lestari menegaskan:

“Perempuan memiliki fitur fleksibilitas dan kemampuan multitasking. Jika dia sadar kelebihannya, dia akan mampu menghadapi tantangan politik dengan cara yang lebih strategis dan humanis” (Wawancara Sri Yogi Lestari, 8 Desember 2024).

Informan Grace Anastasia Surya Widjaja menyoroti bahwa sensitivitas perempuan dalam memahami audiens menjadi kunci keberhasilan dalam komunikasi politik:

“Dengan kepekaan yang lebih tinggi, perempuan dapat membangun komunikasi yang lebih personal dan mendalam, sehingga mampu menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan” (Wawancara 8 Desember 2024).

Informan Putu Melati Purbaningratyo juga menambahkan bahwa gaya komunikasi yang humanis sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, berikut pernyataannya:

“Ketika perempuan melakukan kampanye, diharapkan mereka menunjukkan kecerdasan intelektualnya melalui cara yang soft dan sopan, sehingga orang kagum dan menjadi simpatik” (Wawancara 3 Desember 2024).

Pembahasan

Ethos: Kredibilitas Perempuan sebagai Komunikator Politik

Menurut Aristoteles, ethos mencerminkan kredibilitas seorang komunikator, yang bergantung pada karakter, keahlian, dan integritas mereka (Shanahan & Seele, 2015). Dalam konteks perempuan Bali, ethos terlihat dari bagaimana mereka menggunakan pengalaman pribadi dan nilai budaya sebagai modal untuk membangun kepercayaan masyarakat (Meagher et al., 2021).

Perempuan Bali sering memanfaatkan aktivitas adat seperti *mebraye*, *arisan PKK*, dan *menyama braya* untuk berinteraksi dengan masyarakat (McGregor & Mourão, 2016). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas mereka sebagai pelaku adat, tetapi juga mencerminkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam norma sosial Bali yang patriarkal (Sakina & Siti, 2017).

Namun, budaya patriarki di Bali sering kali menempatkan perempuan dalam peran *triple roles* yang membatasi ruang mereka di ranah publik (Corredor, 2019). Meskipun demikian, perempuan Bali mampu mengintegrasikan peran ini ke dalam strategi komunikasi politik mereka, menunjukkan fleksibilitas dan daya juang yang tinggi (Marasco, 2023).

Pathos: Menggerakkan Emosi dalam Komunikasi Politik

Pathos, atau daya tarik emosional, merupakan elemen penting dalam membangun koneksi dengan audiens (Higgins & Walker, 2012). Perempuan Bali menunjukkan kemampuan

mereka untuk memahami kebutuhan emosional masyarakat, terutama melalui kepekaan dan empati mereka. Sensitivitas perempuan memungkinkan mereka membangun pola komunikasi yang lebih personal dan terstruktur, menyentuh hati masyarakat, dan menciptakan rasa kepercayaan terhadap politisi perempuan (O'Connor et al., 2019). Strategi seperti mendengarkan masalah masyarakat melalui diskusi langsung atau unggahan media sosial memperkuat koneksi emosional antara politisi dan audiens mereka (Berg, 2018).

Selain itu, elemen pathos sangat relevan dalam konteks budaya Bali, di mana perempuan sering menjadi pusat dalam ritual adat dan keluarga. Keterlibatan mereka dalam tradisi ini memberikan daya tarik emosional yang kuat, memungkinkan mereka untuk merangkul masyarakat secara mendalam. *Pathos* ini menjadi strategi kunci perempuan Bali untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas mereka. Hal ini juga terjadi dalam dinamika politik di Bali yang ditegaskan oleh para informan bahwa perempuan lebih dapat mengetahui karakteristik komunikannya dalam menyalurkan pesan komunikasi politik dengan efektif sesuai dengan segmentasi pemilih, sehingga mendapatkan *feedback* atau umpan balik yang positif.

Logos: Logika dalam Strategi Komunikasi Politik

Logos, atau daya tarik berbasis logika, terlihat dari bagaimana perempuan Bali menggunakan argumen dan strategi rasional untuk menyampaikan pesan politik mereka (Rife, 2010). Perempuan Bali mengandalkan kombinasi aktivitas adat dan teknologi modern untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Ging et al., 2019).

Aktivitas seperti *mebraye* dan *posyandu* menjadi alat komunikasi politik yang efektif karena relevansi budayanya di Bali. Media sosial seperti Instagram juga menjadi platform penting yang digunakan politisi perempuan Bali untuk menyampaikan kebijakan dan solusi mereka kepada masyarakat (Brisbane et al., 2023).

Pendekatan ini menunjukkan kemampuan perempuan Bali untuk memadukan strategi tradisional dan modern guna menciptakan komunikasi politik yang lebih efektif (Celis & Childs, 2011). Artinya dengan strategi ini perempuan Bali mampu menyampaikan pesan yang relevan dan logis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menunjukkan adaptabilitas mereka terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Teori Retorika Perempuan Bali sebagai Komunikator Politik

Berdasarkan teori retorika Aristoteles, perempuan Bali sebagai komunikator politik menunjukkan keseimbangan yang kuat antara ethos, pathos, dan logos.

Ethos tercermin dalam kredibilitas mereka yang didasarkan pada peran adat dan nilai budaya, yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap mereka (.

Pathos terlihat dari kemampuan mereka untuk memahami dan menyentuh emosi masyarakat melalui pendekatan yang personal dan empatik (Holman, 2015; Payne & Tornhill, 2021).

Logos ditunjukkan melalui penggunaan strategi rasional yang mengintegrasikan tradisi lokal dan media modern untuk menyampaikan pesan politik yang relevan.

Meskipun tantangan budaya patriarki tetap menjadi hambatan utama, perubahan institusional seperti kuota 30% bagi perempuan di parlemen memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk membuktikan kemampuan mereka di ranah publik. Melalui kombinasi ethos, pathos, dan logos, perempuan Bali menciptakan komunikasi politik yang efektif, humanis, dan. Dengan strategi ini, retorika perempuan Bali tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi hambatan gender tetapi juga menjadi model transformasi politik yang berkeadilan gender.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Bali memiliki potensi besar sebagai

komunikator politik yang efektif, meskipun menghadapi tantangan budaya patriarki yang membatasi ruang gerak mereka di ranah publik. Temuan mengungkapkan bahwa norma adat dan stereotipe gender sering memperhambat peran perempuan pada tugas domestik dan ritual adat, sementara akses mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih sangat terbatas. Namun, pendekatan retorika Aristoteles menunjukkan bahwa perempuan dapat memanfaatkan *ethos* untuk membangun kredibilitas melalui keterlibatan sosial, *pathos* untuk menciptakan hubungan emosional dengan audiens, dan *logos* untuk menyusun argumen yang logis serta meyakinkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan strategi komunikasi modern, perempuan dapat memainkan peran penting dalam membangun wacana politik yang inklusif dan representatif.

Daftar Pustaka

- Berg, L. (2018). *Between Anti-Feminism and Ethnicized Sexism. Far-Right Gender Politics in Germany*. 79–92. <https://doi.org/10.14361/9783839446706-006>
- Brisbane, L., Hua, W., & Jamieson, T. (2023). Morality and the Glass Ceiling: How Elite Rhetoric Reflects Gendered Strategies and Perspectives. *Politics & Gender*, 19(3), 806–840. <https://doi.org/10.1017/s1743923x2200023x>
- Celis, K., & Childs, S. (2011). The Substantive Representation of Women: What to Do With Conservative Claims? *Political Studies*, 60(1), 213–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x>
- Corredor, E. S. (2019). Unpacking “Gender Ideology” and the Global Right’s Antigender Countermovement. *Signs*, 44(3), 613–638. <https://doi.org/10.1086/701171>
- Ging, D., Lynn, T. G., & Rosati, P. (2019). Neologising Misogyny: Urban Dictionary’s Folksonomies of Sexual Abuse. *New Media & Society*, 22(5), 838–856. <https://doi.org/10.1177/1461444819870306>.
- Higgins, C., & Walker, R. (2012). <i>Ethos</I>, <i>logos</I>, <i>pathos</I>: Strategies of Persuasion in Social/Environmental Reports. *Accounting Forum*, 36(3), 194–208. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.003>
- Joniarta, I. W., Pinatih, I. G. A. A. G. D. S., & Pratiwi, N. I. (2019). The Dilemmatic Study of Local Policy Implementation Towards Bali Aga Traditional Village in Culture Conservation: a Case of Tenganan Pengringsingan Village, Manggis District, Karangasem Regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 153–159.
- Kath Woodward. (2008). *Questioning Identity: Gender, Class, Ethnicity edited*. Taylor & Francis e-Library.
- Liu, C., Chen, S., & Shao, Q. (2019). Do CEO Rhetorical Strategies Affect Corporate Social Performance? Evidence From China. *Sustainability*, 11(18), 4907. <https://doi.org/10.3390/su11184907>
- Marasco, R. (2023). The Real Possibility of Physical Killing: A Feminist Critique of Carl Schmitt. *American Journal of Political Science*, 67(4), 1067–1079. <https://doi.org/10.1111/ajps.12803>
- McGregor, S. C., & Mourão, R. R. (2016). Talking Politics on Twitter: Gender, Elections, and Social Networks. *Social Media + Society*, 2(3). <https://doi.org/10.1177/2056305116664218>
- Meagher, K., Attal, B., & Patel, P. (2021). Exploring the Role of Gender and Women in the Political Economy of Health in Armed Conflict: A Narrative Review. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00738-9>
- O’Connor, C., Maher, P. J., & Kadianaki, I. (2019). Exploring the Relationship Between Lay Theories of Gender and Attitudes to Abortion in the Context of a National Referendum on Abortion Policy. *Plos One*, 14(6), e0218333. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218333>

- Rife, M. C. (2010). Ethos, Pathos, Logos, Kairos: Using a Rhetorical Heuristic to Mediate Digital-Survey Recruitment Strategies. *Ieee Transactions on Dependable and Secure Computing*, 53(3), 260–277. <https://doi.org/10.1109/tpc.2010.2052856>
- Roberts, W. R. (2004). *Aristotle : Rhetoric*. Dover Publications.
- Sakina, A. I., & Siti, A. D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share Social Work Journal*. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Shanahan, F., & Seele, P. (2015). Shorting Ethos: Exploring the Relationship Between Aristotle's Ethos and Reputation Management. *Corporate Reputation Review*, 18(1), 37–49. <https://doi.org/10.1057/crr.2014.19>
- Subandi, Y. (2023). Perempuan Dan Politik Di Indonesia: Analisis Bibliometrik Vosviewer. *Primer Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 585–591. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i6.234>
- Yuwono, N. P. (2018). Perempuan Dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis. *Muwazah*, 10(2), 96–115. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1781>
- Zamroni, M. (2016). Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus Partisipasi Selebritis Perempuan Dalam Komunikasi Politik Di Partai-Partai Islam Pada Pemilu 2014 Di Indonesia). *Profetik Jurnal Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1194>